

Penertiban Subsidi Energi Terganjal Regulasi

Penyaluran subsidi energi membutuhkan payung hukum yang jelas. Dengan demikian, anggaran untuk subsidi tersebut benar-benar tersalur kepada yang berhak menerima.

JAKARTA, KOMPAS — Subsidi energi yang meliputi bahan bakar minyak atau BBM, listrik, dan gas, pada 2023 mencapai Rp 179,1 triliun atau lebih tinggi dari target yang Rp 161,6 triliun. Pada 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan besaran subsidi energi sebesar Rp 180,9 triliun. Upaya menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran sudah terganjal regulasi.

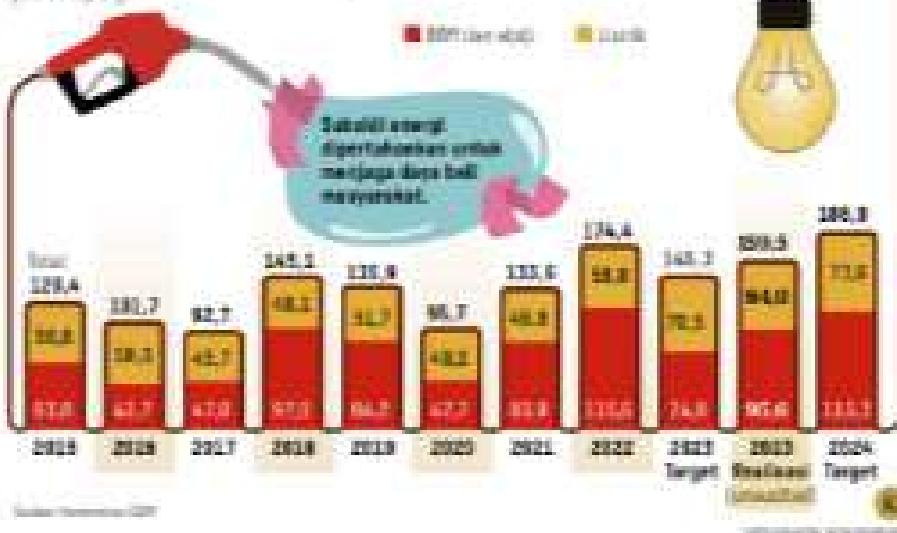
Menurut Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifa Tuzeti, dalam konferensi pers capaian tahun ESDM Tahun 2023 di Jakarta, Senin (15/1/2024), mengatakan, ada tiga peningkatan pemerintahan energi di masyarakat. Selain itu, kenaikan harga bahan baku BBM dan listrik juga diantisipasi. Namun, ini memantapkan subsidi energi akan diberikan, disertai sejumlah program agar penyebarannya tepat sasaran.

"Harus ada upaya-upaya, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah, agar subsidi diberikan dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga lebih efisien (tepat sasaran). Dengan mengoptimisasinya, (ESDM) akan subsidi tidak sebesar yang ditargetkan," ujar Arifa.

Program tepat sasaran itu di antaranya pada transformasi perusahaan listrik bernasib ungu 3 kilowatt (kg). Itu di-atur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Teknik Penyaluran ke Ulang Lipatoff Perumahan Gas Tertentu Tepat Sasaran. Juga Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 04/2023 tentang Pedoman Wilayah dan Waktu

Anggaran Subsidi Energi 2015-2024

(dalam rupiah)



Sumber: Kementerian ESDM

Pelaksanaan Penyaluran ke Ulang Lipatoff Perumahan Gas Tertentu Tepat Sasaran, yang ditetapkan pada Februari 2023.

Dalam Keputusan Dirjen Migas itu disebutkan antara lain penyaluran listrik tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan dengan nama induk perusahaan (NIK) yang terdapat dalam sistem berbasis web dan sistem aplikasi, terhitung sejak 1 Januari 2024. Adapun penyaluran dari uji coba pelaksanaan sudah dimulai sejak 1 Maret 2023.

"Tetapi, bagaimana mengoptimalkan (subsidi) tanpa mengganggu keberlanjutan. Masyarakat juga bisa memahami, karena jika kita bisa menghemat, subsidi

tidak akan dapat dimanfaatkan ke sektor lain yang membutuhkan," kata Arifa.

Selanjutnya, pemerintah memantapkan realisasi Peraturan Presiden (Perpres) No 19/2014 tentang Penyelenggaraan, Penyaluran, dan Harga Jual Normal BBM yang akan mengatur lembaga pelaksana pertama PT Pertamina (Persero) juga mulai melakukan registrasi dengan kode rumah warga (KRW). Namun, penyaluran belum dilakukan karena masih proses tak kunjung selesai.

Arifa tak menjauhkan pada tingkat kelangkaan resmi perpres itu, tetapi akan berupaya menertibkan penyaluran BBM dan listrik lebih tepat sasaran. "Ini bukan masalah, melainkan

subsidi akan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi. Kita pakai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ujarnya.

Perlu regulasi

Direktur Eksekutif Energy Watch Dirjen Energi juga program subsidi tepat sasaran, baik pada listrik 3 kg maupun BBM, dan bisa berjalan optimal tanpa ada regulasi yang jelas. Padahal, jika subsidi energi benar-benar tersebar kepada warga yang berhak, anggaran bisa diluluskan dan dimanfaatkan untuk sektor-sektor lain yang juga penting.

"Harus ada landasan regulasi untuk lebih tepat sasaran. Memang kebijakan penyaluran

subsidi agak kurang populis, tetapi memang dapat berhemat jika subsidi untuk BBM dan listrik ini lebih tepat sasaran," kata Dirjen.

Selain soal Perpres No 19/2014 yang ditandatangani terdapat untuk mengatur penyaluran pertama, juga perlu revisi Perpres No 104/2017 tentang Penyelenggaraan, Penyaluran, dan Penetapan Harga Lipatoff Perumahan Gas 3 Kilowatt Normal. Dirjen, mengakui lama subsidi energi bisa diteruskan lagi, maka semakin sulit pada pelaksanaannya ke depan.

Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pengatur Harga Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui pertalite pada 2023 sebanyak 50 juta liter per hari atau 92,18 persen dari kuota. Sementara akan mencapai 175 juta liter atau 100,17 persen dari kuota.

Untuk mengatur penyaluran pertalite, BPH Migas masih menunggu kebijakan perpres yang bakal mengaturnya. "Pertalite belum (ada penyaluran). Kami sudah siapkan di dalam revisi Perpres (No 19/2014). Jadi, kita tunggu. Kalau revisi perpres terbit, kita bisa melakukan pengamatan untuk penyaluran pertalite," kata Kepala BPH Migas Erika Betanwati, Senin (14/1).

Terkait capaian di sektor ESDM pada 2023, total investasi tercatat 36,3 miliar dollar AS atau meningkat dari 2022 yang 27 miliar dollar AS. Sementara pada 2024 ditargetkan sebesar 29,2 miliar dollar AS. Adapun realisasi pemerintahan negara tahun penuh (PNBP) mencapai Rp 380,3 triliun atau 116 persen dari target 2023.